

MENGEMBANGKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI

FAHIMUL AMRI

STKIP PGRI Jombang

Jl. Pattimura III/20 Jombang

Email : fahimul.amri@gmail.com

Abstrak. *Makhluk ekonomi (homo economicus) saat ini menjadi dalih bagi pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas ekonominya, sehingga aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup cenderung dapat memberikan kerugian kepada pihak lain. Banyak kasus yang terjadi dalam aktivitas ekonomi yang memberikan kerugian kepada pihak lain. Padahal dalam konteks sosial, setiap pelaku ekonomi pasti berhubungan dengan pelaku ekonomi lain. Kepentingan diri seseorang pasti berhubungan dengan kepentingan diri orang lain. Oleh karena itu aktivitas ekonomi yang dijalankan juga tidak boleh memberikan kerugian kepada orang lain. Untuk mewujudkan perilaku ekonomi yang tidak merugikan pihak lain, pendidikan menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan perilaku ekonomi yang tidak serakah, yaitu melalui penanaman karakter ekonomi kepada siswa. Peran pendidikan ekonomi sangat penting dalam menanamkan nilai karakter yang berorientasi ekonomi yaitu karakter tanggung jawab ekonomi, kejujuran ekonomi, dan kepedulian ekonomi. Nilai-nilai karakter tersebut dapat diimplementasikan dalam pembelajaran ekonomi. Nilai karakter ekonomi dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menjalankan aktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat.*

Kata Kunci: Nilai Karakter Ekonomi, Tanggung Jawab, Kejujuran, Kepedulian

PENGANTAR

Sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*), manusia akan terus berusaha untuk memenuhi segala macam kebutuhan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Tetapi disisi lain sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia jumlahnya sangat terbatas. Sehingga manusia berusaha dengan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Disisi lain manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu berhubungan dengan manusia lain dalam memenuhi semua kebutuhannya. Dalam konteks inilah manusia dihadapkan pada keharusan untuk memiliki perilaku yang tidak merugikan orang lain. Karena perilaku yang baik menjadi sangat penting bagi terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang saling menguntungkan. Akan tetapi kenyataannya banyak masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi kadangkala cara-cara yang digunakan sangat merugikan.

Pelaku ekonomi menjalankan aktivitas ekonominya hanya berupaya untuk mendapatkan keuntungan, hasil, dan kepuasan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan keuntungan yang setinggi-tingginya, pelaku ekonomi menggunakan berbagai cara, yang sebenarnya cara tersebut sangat merugikan pihak lain. Padahal sebagai manusia yang hidup bersama, kepentingan diri selalu berhubungan dengan kepentingan orang lain. Inilah kerakusan dan keserakahannya pelaku ekonomi yang sampai sekarang masih nampak terjadi. [1] menyebutkan keserakahannya dan kerakusan masih terjadi dan keserakahannya dan perilaku serakah salah satunya dapat ditinjau dari perpektif ekonomi. Dalam konteks inilah bagaimana pendidikan mampu mencegah aktivitas ekonomi yang serakah. Padahal selama ini pendidikan yang diajarkan kepada siswa masih memberikan kontribusi pada peningkatan perilaku ekonomi yang serakah [2]. Hal yang sama bahwa belajar ekonomi yang selama ini diterapkan di sekolah dapat menjadikan perilaku siswa lebih mementingkan diri sendiri dari pada mengutamakan kepentingan pihak lain [3].

Oleh karena itu dalam konteks ini, bagaimana pendidikan khususnya dalam pembelajaran ekonomi mempunyai peran dalam mengembangkan karakter untuk mencegah perilaku yang dapat merugikan orang lain dalam menjalankan aktivitas ekonomi. [4] menyebutkan bahwa nilai-nilai moral dapat dikembangkan dalam pembelajaran termasuk dalam pendidikan ilmu sosial. Hal yang sama [5] bahwa pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan karakter siswa. Oleh karena itu dalam pendidikan di sekolah harus mampu mengembangkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran ekonomi. Untuk memperkuat argumentasi ini

perluanya mengembangkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran ekonomi, maka dalam artikel ini akan dipaparkan berbagai kasus dalam aktivitas ekonomi yang mengindikasikan adanya perilaku buruk dan merugikan. Sehingga diperlukan pengembangan nilai karakter dalam konteks ekonomi melalui pendidikan khususnya melalui pembelajaran ekonomi.

PEMBAHASAN

Bagian pertama: Berbagai Krisis Ekonomi Dunia

Kasus pertama: Krisis Ekonomi Tahun 1930-an

Perekonomian dunia khususnya perekonomian Amerika Serikat (AS) pernah mengalami masa suram dengan adanya krisis ekonomi besar yang sering disebut sebagai Great Depression. Depresi besar ini mampu menghentikan perputaran ekonomi di negara tersebut. Bahkan krisis ini merembet ke negara di Eropa dan bahkan sampai ke seluruh dunia termasuk Indonesia yang pada masa itu masih di jajah oleh Belanda.

Depresi ekonomi ini diawali dengan dengan jatuhnya harga saham pada 4 September 1929. Berita itu menjalar dan memuncak pada jatuhnya harga saham yang lebih parah pada 29 Oktober 1929 yang dikenal sebagai Black Tuesday [6]. Runtuhnya Wall Street tahun 1929 juga dikenal dengan sebutan keruntuhan '29 atau *The Wall Street Crash of 1929*. Crash adalah peristiwa jatuhnya bursa saham di Amerika Serikat. Keruntuhan ini merupakan salah satu peristiwa kehancuran bursa yang paling besar dalam sejarah Amerika [7].

Depresi besar tahun 1930-an merupakan bencana besar bagi perekonomian Amerika dan Eropa. Standar hidup masyarakat merosot tajam, output industri turun sampai 30 persen, bank komersial ambruk, pendapatan masyarakat, penerimaan pajak, keuntungan, harga-harga komoditas, semuanya anjlok seiring dengan turunnya volume perdagangan dunia sampai lebih dari 50%, pengangguran naik lebih dari 25 persen sementara di beberapa negara bisa mencapai 33%, kota-kota di berbagai belahan dunia jadi sepi, terutama yang sangat tergantung pada industri. Pekerjaan konstruksi praktis mandeg di sejumlah negara. Sementara aktivitas pertanian di pedesaan juga menurun tajam karena harga komoditas dunia juga merosot sampai 60%, dan nilai saham rata-rata jatuh 90 persen sepanjang gejala antara tahun 1929 – 1930 [8],[9].

Padahal sebelum itu perekonomian di Amerika dan Eropa mampu menciptakan kesejahteraan. John Maynard Keynes menyebutkan bahwa penyebab dari depresi tersebut salah satunya adalah dari adanya perilaku investor yang buruk yaitu banyak spekulator yang tidak rasional dengan membeli saham secara besar-besaran [10]. Nampaknya nyata kasus ini bermula dari para pelaku ekonomi yang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tanpa memperdulikan kondisi ekonomi secara keseluruhan, yang akhirnya membuat sengsara seluruh masyarakat di AS bahkan dunia.

Kasus kedua: Krisis Ekonomi Tahun 1997-1998 di Asia dan krisis 2008 di Amerika Serikat

Krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar Baht di Thailand pada 2 Juli 1997 yang dikenal dengan nama krisis *Tom Yam Gung*, dalam tahun 1998 dengan cepat berkembang sampai ke Indonesia. Bahkan krisis ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang terparah di Asia Tenggara [11].

Krisis ini merupakan krisis keuangan dan perbankan yang menyebabkan banyak bank mengalami kebangkrutan, dan bahkan krisis ini tidak hanya menyentuh di sektor keuangan tetapi juga mampu menggoyahkan sektor riil. Akibat dari krisis 1997-1998, kurs mata uang rupiah anjlok yang ditutup pada level Rp 4.850 per dollar AS pada tahun 1997, meluncur dengan cepat ke level sekitar Rp 17.000 per dollar AS pada 22 Januari 1998, atau terdepresiasi lebih dari 80 persen. Harga barang menjadi semakin melonjak tinggi tidak terkendali disertai langkanya barang kebutuhan di pasar, bahkan ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga besar bertumbangan. Sekitar 70% lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal banyak perusahaan yang bangkrut dan tidak mampu lagi untuk memproduksi. Akibatnya melahirkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja [12].

Krisis tersebut juga diperparah dengan utang luar negeri yang segera jatuh tempo. Dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai 138 milyar dollar AS, sekitar 72,5 milyar dollar AS adalah utang swasta yang dua pertiganya jangka pendek, di mana sekitar 20 milyar dollar AS akan jatuh tempo dalam tahun 1998. Sementara pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 milyar dollar AS [13]. Nampaknya pada saat itu banyak debitur yang tidak mampu melunasi hutang pokok beserta bunga pinjaman pada saat jatuh tempo, sehingga banyak bank bangkrut.

Berselang 10 tahun dari krisis yang menerpa Asia, tahun 2008 ekonomi dunia kembali mengalami krisis global dalam bentuk krisis keuangan dan perbankan yang hampir sama dengan krisis tahun 1930-an dan krisis tahun 1997-1998. Krisis keuangan global tahun 2008 ini lebih dikenal sebagai krisis *Subprime Mortgage* atau krisis kredit macet di sektor perumahan. Krisis global tahun 2008 yang berawal dari krisis keuangan Amerika Serikat terjadi karena banyaknya *default payment* dari instrument *credit default swap* di pasar keuangan

Amerika Serikat. *Subprime mortgage* merupakan istilah untuk kredit perumahan (mortgage) yang diberikan kepada debitur dengan sejarah kredit yang buruk atau berisiko tinggi, sehingga praktek perbankan ini dapat digolongkan sebagai kredit yang berisiko tinggi [14]. Gelombang gagal bayar yang terjadi bersamaan dengan jatuhnya harga rumah di AS, akhirnya membuat semua investor maupun lembaga yang terlibat dalam penjaminan ke dalam persoalan likuiditas yang sangat besar. Salah satu yang terkena dampak buruk dan harus bangkrut diantaranya adalah Lehman Brothers [15]. Selain Lehman Brothers beberapa perusahaan keuangan juga mengalami kerugian seperti yang dialami oleh Fannie Mae dan Freddie Mac yang diambil alih oleh pemerintah AS, dan Merrill Lynch yang diambil alih oleh Bank of America [16].

Menarik untuk diperhatikan bahwa bank-bank tersebut bangkrut salah satunya karena kredit macet atau kredit bermasalah. Sekarang timbul pertanyaan mengapa bank-bank tersebut begitu mudahnya memberikan mengucurkan kredit dan pinjaman padahal aset dari debitur nilainya tidak cukup untuk membayar pokok pinjaman? Atau dalam arti aset atau jaminan debitur lebih kecil dari nilai pinjaman. Itu semua dapat terjadi karena keduanya “main mata” atau “kongkalikong” demi memuluskan proses pinjaman. Kreditur dalam hal ini bank kurang memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian pinjaman khususnya *capacity* atau kemampuan debitur untuk mengembalikan pokok pinjaman saat jatuh tempo. Hal ini terjadi karena kreditur “berteman” dengan debitur, disisi lain debitur berusaha untuk “menipu” dalam proses pencarian dana pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa standar yang aman dalam pengucuran pinjaman tidak digunakan dan manajemen risiko dalam pengucuran dana tidak diperhatikan.

Bagian kedua: Penipuan Ekonomi dan Kejahatan Produksi

Kasus pertama: Korupsi, Suap, dan Pencucian Uang

Korupsi menjadi masalah yang sangat serius bagi pembangunan bangsa karena korupsi membuat masyarakat sengsara dan tidak berdaya. Seseorang dalam masyarakat yang sebenarnya mempunyai hak untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu, gagal total untuk mendapatkan hak tersebut karena salah satu penyebabnya adalah adanya korupsi dan suap yang dilakukan oleh oknum tertentu. Saat ini jumlah oknum yang korupsi tidak semakin menurun, bahkan korupsi dan suap semakin menjadi-jadi. Bahkan pihak penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) yang konon merupakan panglima untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat, justru menjadi aktor utama untuk melakukan korupsi dan suap. Oknum polisi yang melakukan korupsi tidak main-main, justru yang mempunyai pangkat tinggi justru melakukan korupsi yang sebenarnya menjadi contoh bagi bawahannya. Kasus yang menggemparkan lembaga kepolisian yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Irjen Pol Djoko Susilo yang tersandung kasus simulator SIM, Mahkamah Agung memperkuat putusan bading Pengadilan Tinggi dengan memberikan ganjaran kepada sang Jendral dengan hukuman pidana penjara 18 tahun disertai pidana denda Rp1 miliar dan hukuman tambahan berupa uang pengganti Rp32 miliar pada tingkat kasasi [17].

Oknum kejaksaan yang sebenarnya sebagai lembaga yang menuntut untuk mencapai dan memberikan keadilan justru ikut-ikutan terjerat suap. Kasus korupsi dan suap yang dilakukan oleh oknum kejaksaan yang cukup menggemparkan adalah kasus Jaksa Urip Tri Gunawan yang menerima suap dari Artalyta Suryani orang kepercayaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim, sebesar US\$ 660 ribu. Dia diganjar dengan hukuman selama 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider satu tahun kurungan [18].

Bahkan yang lebih parah, hakim yang memutuskan keadilan justru semakin marak untuk melakukan tindakan korupsi atau menerima suap. Mulai dari hakim yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bahkan sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Kita bisa menyaksikan beberapa kasus korupsi atau suap yang menjerat para aparat penegak hukum tersebut. Kasus korupsi dan suap yang dilakukan oleh oknum hakim dan panitera tidak main-main. Banyak kasus yang telah terungkap diantaranya dugaan kasus suap tiga hakim dan seorang panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang menerima suap sejumlah US\$ 27,000 dan SGD 5,000 dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho [19] dan masih banyak kasus dugaan korupsi, suap dan gratifikasi yang menjerat oknum hakim.

Selain itu kasus suap yang juga sangat fenomenal adalah terkuaknya kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menimpa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Akil Mochtar dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa pemilihan kepala daerah di MK, majlis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup kepada terdakwa [20].

Kasus suap juga menimpa beberapa oknum advokat, kasus terbaru adalah kasus suap yang menjerat OC Kaligis. kasus dugaan penerimaan dan pemberian suap kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara. Akhirnya Majelis pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta memperberat vonis hukuman dari 5,5 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Kaligis divonis bersalah karena memberikan uang sejumlah 5.000 Dolar Singapura dan USD15.000 pada Hakim Ketua PTUN Tripeni Irianto,

dan masing-masing USD5.000 pada hakim anggota PTUN Dermawan Ginting dan Amir Fauzi. Sementara, Panitera PTUN Syamsir Yusfan mendapat USD2.000 [21]. Beberapa kasus yang menyeret oknum yang berkutat pada keadilan sudah melakukan tindak pidana korupsi, maka siapa lagi yang akan dipercaya untuk mengawal dan menegakkan keadilan?.

Korupsi selain dilakukan oleh aparat penegak hukum, juga dilakukan oleh oknum yang ada dalam pemerintahan. Mulai dari kepala desa, bupati/wali kota dan wakil bupati/walikota, gubernur dan wakil gubernur bahkan sampai menteri turut terjerat kasus tindak pidana korupsi, bahkan yang paling mencengangkan adalah korupsi dan suap dilakukan oleh pasangan suami istri dari oknum pejabat. Bahkan korupsi ada yang diduga dilakukan oleh dinasti (keluarga besar) dari pejabat yang sedang berkuasa. Beberapa kasus korupsi dan suap yang dilakukan oleh pejabat yang sedang berkuasanya diantaranya dilakukan oleh Bupati Empat Lawang nonaktif Budi Antoni Aljufri dan istrinya, Suzana Budi Antoni, masing-masing divonis 4 tahun dan 2 tahun penjara. Keduanya didenda Rp 150 juta dengan subsider 2 bulan kurungan. Keduanya oleh pengadilan dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan memberikan keterangan yang tidak benar [22].

Contoh kasus lain yang menjerat gubernur Ratu Atut Chosiyah. Atut divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dengan hukuman penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan, karena dianggap bersalah memberikan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar. Bahkan pada saat proses banding, pengadilan memperberat hukuman Atut menjadi tujuh tahun penjara [23]. Kasus lain yang juga menjerat menteri pemuda dan olah raga Andi Mallarangeng yang kemudian di vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta [24].

Tidak sampai disitu kasus korupsi dan suap juga sering kali menjerat anggota dewan baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun yang menjerat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan diantaranya terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak contoh kasus korupsi atau suap yang menjerat oknum anggota dewan, diantaranya kasus yang menjerat M. Nazaruddin yang divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dan diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan [25], dan masih banyak lagi anggota DPR yang telah divonis pada kasus tindak pidana korupsi, atau yang sampai saat ini masih diduga melakukan tindakan tersebut. Menilik hal tersebut mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya membela kepentingan rakyat yang masih hidup dalam kekurangan, bukan justru tindakan mereka yang merugikan.

Melihat fakta-fakta dari berbagai sumber tersebut, dapat dilihat secara nyata bahwa yang melakukan tindakan buruk tersebut adalah orang-orang yang relatif pendidikannya tinggi, dan mempunyai kemampuan dalam hal ekonomi. Akan tetapi mereka tetap melakukan hal buruk tersebut. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa perilaku korupsi lebih banyak dilakukan oleh orang-orang terpelajar atau berpendidikan dan mempunyai status sosial ekonomi yang relatif lebih baik. Hal ini menunjukkan keserakahan dan kerakusan mereka dalam aktivitas ekonomi.

Kasus kedua: Pemalsuan

Seiring dengan kebutuhan manusia yang beranekaragam, muncul berbagai macam barang atau produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mulai dari barang kebutuhan pokok (sembako) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sampai barang atau produk yang berteknologi canggih. Hal inilah yang menjadi peluang bagi oknum nakal untuk mengelabui konsumen dengan menyuguhkan berbagai macam produk yang tidak sesuai atau yang menyerupai dengan barang aslinya alias barang palsu. Pelaku ekonomi nakal tersebut ada yang menggunakan merek yang hampir sama maupun cara lain yang bisa mendatangkan keuntungan besar bagi mereka. Mereka berupaya memproduksi barang yang konsumen dibuat sulit untuk membedakan antara barang yang asli dan barang palsu.

Berdasarkan hasil survei Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengenai produk palsu terhadap ekonomi nasional selama 2014 sudah tembus mencapai Rp 65,1 triliun. Kerugian terdiri dari produk makanan dan minuman Rp 13,39 triliun, produk pakaian dan barang dari kulit Rp 41,58 triliun, produk obat-obatan dan kosmetik Rp 6,5 triliun serta produk software dan tinta Rp 3,6 triliun [26].

Padahal pemalsuan barang dapat mengakibatkan kerugian secara ekonomis, terutama jelas kepada pengusaha yang mempunyai hak untuk memproduksi barang asli. Selain itu menurut survey oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) dan organisasi nonpemerintah Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) pemalsuan juga dapat mengakibatkan kerugian kepada karyawan karena mereka kehilangan potensi upah sebesar Rp 3 triliun, dan juga dapat menimbulkan kerugian kepada pemerintah karena kehilangan potensi pendapatan pajak tidak langsung sebesar Rp 424 milyar per tahun [27].

Menarik lagi untuk disimak, baru-baru ini kasus yang menggemparkan jagad kesehatan dengan banyaknya kasus pemalsuan. Sektor kesehatan menjadi salah satu potensi untuk mendapatkan keuntungan yang

besar untuk dapat disasar oleh para pelaku ekonomi yang jahat. Kasus pemalsuan yang mengemuka dan menjadi perbincangan khalayak adalah masalah pemalsuan vaksin untuk bayi atau balita. Praktik pembuatan vaksin palsu telah berlangsung sejak tahun 2003 hingga tahun 2016 ini dan telah menyebar ke beberapa daerah. Jadi dalam rentang 13 tahun para sindikat pemalsu vaksin untuk bayi dan balita telah beroperasi untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya [28]. Para sindikat ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari pemalsuan vaksin ini karena harga vaksin palsu dijual sekitar Rp 200-400 ribu lebih murah dibandingkan dengan harga vaksin yang asli [29]. Penawaran seperti ini jelas akan membuat beberapa tempat pelayanan kesehatan tergiur dengan penawaran produk yang murah. Nampak jelas pemalsuan ini sangat merugikan negara dan membuat keresahan sebagian besar masyarakat yang mempunyai anak yang kelahirannya berada pada rentang waktu antara tahun 2003 sampai tahun 2016 ini.

Tidak sampai disini, setelah pemalsuan vaksin terungkap dan muncul ke permukaan, lagi-lagi penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya muncul dengan adanya kartu BPJS palsu di beberapa daerah (terdeteksi di Bandung Jawa Barat). Para pelaku penipuan memberikan janji kepada korban bahwa tidak perlu untuk membayar iuran perbulan dan kartu berlaku seumur hidup, dengan menarik iuran dari korban sebesar Rp 170 ribu per orang. Penipuan ini sudah berlangsung hampir satu tahun. Bahkan lebih parahnya di antara para pelaku dalam menjalankan kejahatannya mengatasnamakan Yayasan Rumah Peduli Dhuafa, sehingga mudah untuk mengelabui para korbannya. Nampak jelas berbagai modus jahat digunakan oleh para pelaku ekonomi, bahkan mengatasnamakan untuk pemberian santunan bagi anak yatim dan orang miskin [30],[31].

Melihat fenomena di atas, menarik kita cermati bahwa semua lingkaran kejahatan pemalsuan hanya mempunyai satu orientasi tujuan yaitu masalah ekonomi, masalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Kasus Ketiga: Penganiayaan dalam Aktivitas Produksi

Aktivitas ekonomi tidak bisa terlepas dari kegiatan produksi. Aktivitas produksi mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi sampai menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu penyokong kegiatan tersebut adalah penggunaan sumber daya manusia, dalam hal ini sering disebut karyawan atau pegawai. Karyawan menjadi salah satu faktor penentu bagi lancarnya proses produksi. Bahkan karyawan dapat disebut sebagai orang terdepan (*front line*) bagi kemajuan usaha [32].

Namun nyatanya karyawan atau pegawai yang dipekerjakan mendapatkan sesuatu yang kurang layak dari oknum pengusaha jika dibandingkan dengan apa yang telah mereka usahakan bagi kemajuan usaha. Banyak ditemukan berbagai perlakuan yang kurang layak bahkan sampai penyiksaan secara fisik dan mental yang diterima oleh karyawan. Beberapa kasus yang dapat disebutkan antara lain kasus penganiayaan dan menyekap karyawan yang dilakukan oleh pengusaha pabrik wajan, panci, dan peralatan dapur yang berlokasi di Tangerang Banten. Tidak tanggung-tanggung 25 orang karyawan pabrik tersebut yang disekap [33]. Karyawan tersebut diperlakukan secara tidak sewajarnya sebagai orang yang bekerja. Mereka dipaksa bekerja lebih dari 12 jam untuk membuat 200 panci. Jika tidak mencapai akan disiksa dan dipukul. Mereka bekerja mulai jam 5.30 pagi hingga jam 1 malam [34].

Contoh kasus lain yang cukup mengejutkan adalah penganiayaan yang dilakukan terhadap pembantu rumah tangga dan calon tenaga kerja wanita. Masih teringat kasus tersebut muncul di daerah Medan Sumatera Utara. Penganiayaan dilakukan terhadap beberapa pembantu rumah tangga (PRT) selama beberapa tahun terakhir. Penganiayaannya tidak hanya kejam, tetapi juga bengis dan sadis, bahkan sampai berakibat meninggalnya salah satu dari pembantu rumah tangga tersebut [35].

Tidak hanya sampai disitu, di berbagai media massa sering muncul pemberitaan tentang berbagai macam penganiayaan yang dilakukan oleh majikan kepada pembantu rumah tangga. Hal ini sangat miris dari sisi sosial dan juga dari sisi ekonomis. Dari sisi sosial, tidak selayaknya seseorang memperlakukan orang lain secara kejam bahkan bisa dianggap memperlakukan manusia seperti hewan. Dari sisi ekonomis, karyawan atau seseorang yang bekerja bertujuan untuk mencari penghasilan untuk melanjutkan kehidupannya, akan tetapi oleh oknum pengusaha hak-hak mereka tidak diberikan.

Melihat fakta tersebut, nampak nyata bahwa perilaku pengusaha tujuan utamanya berorientasi pada hal-hal ekonomis. Kerja secara paksa dan mengabaikan hak-hak karyawan dilakukan oleh pengusaha demi menekan biaya sekecil mungkin untuk mendapatkan dan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal semestinya mereka bekerja untuk mendapatkan upah yang layak sekaligus perlakuan yang baik dari pengusaha. Bagi pengusaha nakal lagi-lagi motif ekonomi menjadi alasan dan dalil bagi mereka untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian khususnya bagi dunia pendidikan, untuk dapat mencegah dengan membekali pengetahuan dan sikap kepada siswa.

Kasus keempat: Penggunaan Bahan Berbahaya

Baru-baru ini di berbagai media semakin marak pemberitaan tentang penggunaan berbagai macam bahan atau zat berbahaya untuk kegiatan produksi. Banyak pengusaha, mulai dari pengusaha yang masih mempunyai usaha dalam skala “pinggiran” (produsen yang sangat kecil/mikro), pengusaha skala kecil, menengah, bahkan sampai pengusaha skala besar. Berbagai macam cara yang digunakan oleh oknum pengusaha termasuk menggunakan cara-cara curang demi untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Mereka berupaya untuk mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

Aktivitas produksi mereka dalam menghasilkan barang dicampur dengan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rodhamine atau pewarna tekstil, maupun zat berbahaya lainnya. Penggunaan zat berbahaya tersebut sangat membahayakan bila dikonsumsi bahkan bila secara rutin mengkonsumsi barang yang mengandung zat tersebut, organ tubuh dan syaraf seperti hati, jantung, otak, limfa, pankreas, ginjal, dan susunan saraf pusat serta organ tubuh lainnya akan mengalami kerusakan bahkan bisa menimbulkan penyakit kanker hingga berujung pada kematian. Berbagai berita tentang kasus penggunaan bahan berbahaya dalam kegiatan produksi yang telah banyak beredar di berbagai media masa antara lain penggunaan formalin pada makanan seperti tahu, ikan asin, ayam, dan mi. Tujuannya agar barang tersebut tidak cepat rusak atau busuk. Bila busuk jelas pengusaha atau pedagang akan mengalami kerugian. Parahnya lagi adalah penggunaan bahan berbahaya sering kali dijumpai pada produk makanan yang disukai oleh anak-anak. Banyak pedagang atau pengusaha nakal menyasar produknya ke lingkungan sekolah, karena anak cenderung tidak berfikir panjang tentang makanan yang mereka makan mengandung bahan berbahaya atau tidak, selama menarik untuk anak-anak maka produk yang berbahaya tersebut akan laku keras. Berbagai bahan berbahaya seperti pewarna tekstil dan boraks sering digunakan pada produk makanan yang disukai anak-anak [36],[37].

Kasus lain yang cukup menghebohkan adalah terbongkarnya usaha yang menggunakan bahan baku yang sudah busuk seperti yang telah ditemukan di daerah Bandung Jawa Barat dan di Sidoarjo Jawa Timur. Pabrik yang telah beroperasi beberapa bulan ini bahkan di Sidoarjo sudah hampir lima tahun ternyata menggunakan kulit sapi dan cecek kikil impor dari Australia. Bukan kulit sapi segar, akan tetapi kulit sapi yang telah membusuk dan dihindangi belatung. Kulit sapi busuk tersebut supaya terlihat seperti segar oleh oknum pengusaha curang tersebut diberikan berbagai zat yang dapat merubah dari busuk terlihat segar dan terlihat layak untuk dikonsumsi dengan cara memberikan pemutih maupun zat berbahaya lain yang dapat mengganggu kesehatan bila dikonsumsi [38],[39].

Disamping itu ada beberapa oknum yang sengaja menjual produk yang telah kadaluwarsa, seharusnya barang kadaluwarsa harus dimusnahkan karena bila dikonsumsi akan membahayakan kesehatan konsumen [40]. Namun hal tersebut nampaknya masih dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan maupun kekurang hatia-hatian dari konsumen pada saat membeli produk yang akan mereka konsumsi. Hal ini sering terjadi mendekati hari-hari tertentu misalnya menjelang hari raya idul fitri. Pengusaha maupun pedagang nakal sering memanfaatkan momen tersebut untuk meraup keuntungan yang besar dengan menjual produk yang telah kadaluwarsa.

Kecurangan juga sering muncul dengan penggunaan barang-barang yang diharamkan atau tidak dihalalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti penggunaan segala hal dari hewan babi yang dijual secara umum, penggunaan daging tikus pada pembuatan bakso, dan lain-lain. Dalam konteks di Indonesia, pembuatan barang konsumsi yang diproduksi oleh pengusaha harus mempunyai ijin produk yang halal dari MUI, sehingga barang tersebut layak untuk dikonsumsi secara umum. Produk yang tidak mempunyai ijin tersebut, dapat dikatakan sebagai produk yang mempunyai potensi tidak halal atau tidak baik untuk dikonsumsi. Selain itu yang lebih penting adalah harus mendapatkan ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produk terutama makanan dan obat-obatan untuk dapat diedarkan kepada konsumen harus mendapatkan ijin dari badan tersebut. Produk yang belum ada ijin tetapi dipaksakan untuk diedarkan kepada masyarakat maka termasuk itu merupakan suatu tindakan yang melanggar.

Melihat fakta tersebut sangat terkait dengan keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh pengusaha. Penggunaan bahan berbahaya tersebut sebenarnya menghilangkan kepercayaan yang telah diberikan oleh konsumen. Konsumen pada awalnya sangat percaya terhadap produk yang dihasilkan, dengan mengetahui bahwa produk yang mereka konsumsi mengandung bahan berbahaya, konsumen pasti tidak akan kembali menggunakan produk yang dihasilkan oleh oknum pengusaha yang curang tersebut. Bisa dikatakan dalam jangka pendek, ya mereka pengusaha nakal memperoleh keuntungan yang sangat besar, tapi ingat dalam jangka panjang, mereka akan mengalami keruntuhan produksi, karena sudah tidak ada lagi konsumen yang percaya terhadap produk yang mereka hasilkan. Akibatnya produk yang telah dihasilkan tidak akan terjual. Seharusnya pelaku usaha memperhatikan apa yang disebut sebagai *golden rules* atau kaidah emas, yaitu memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri [41]. Dalam konteks penggunaan zat berbahaya, seharusnya pengusaha memposisikan dirinya seperti konsumen. Jikalau pengusaha mau diperlakukan baik, maka seharusnya

dia memperlakukan baik pula kepada konsumen. Jelas penggunaan bahan berbahaya pada produk yang mereka hasilkan akan meruntuhkan citra perusahaan yang telah mereka bangun.

Bagian ketiga: Kerusakan Lingkungan

Kasus pertama : Pembakaran Hutan dan Pembalakan Liar

Indonesia merupakan salah satu negara mempunyai wilayah hutan yang sangat luas, yang memberikan sumbangan besar bagi keberadaan oksigen di udara. Keberadaan hutan menjadi suatu yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan umat manusia. Disisi yang lain kebutuhan manusia terhadap barang yang berasal dari bahan kayu juga semakin meningkat. Hal ini menjadi delematis, disisi satu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kayu dan disisi lain untuk menjaganya. Nyatanya untuk memenuhi kebutuhan kayu, beberapa oknum melakukan penebangan secara liar atau sering disebut pembalakan liar (*illegal logging*) terhadap kayu yang tumbuh di hutan.

Pembalakan liar merupakan perbuatan yang sangat dilarang berdasarkan peraturan dari kementerian terkait. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menebang pohon secara serampangan tanpa memperhatikan aspek keberadaan hutan. Hal ini jelas menjadi perhatian, bahkan secara global, illegal logging menjadi isu yang sangat mengemuka, karena banyak negara mencemaskan terjadinya proses pencairan es di kutub selatan dan utara yang disebabkan semakin berkurangnya hutan sebagai penghasil oksigen yang bermanfaat bagi kehidupan semua makhluk hidup termasuk manusia. Dalam arti kata pembalakan liar dan pengrusakan hutan dapat menyebabkan perubahan iklim. Es dikutub yang mencair dapat menyebabkan dataran menjadi tenggelam. Hal ini menjadi sangat menakutkan bagi kehidupan manusia.

Selanjutnya tidak kalah penting dari sisi ekonomi, pembalakan liar dan pengrusakan hutan sangat merugikan negara. *Human Rights Watch* (HRW) menyebutkan kerugian Indonesia akibat pembalakan liar tidak berkurang, tetapi semakin meningkat. Diperkirakan pendapatan yang hilang akibat pembalakan liar yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 70 triliun antara 2007-2011. Bahkan pada tahun 2011 saja total kerugian sudah mencapai lebih dari Rp 20 triliun [42]. Lebih lanjut kerugian kas negara dan juga kerugian masyarakat Indonesia secara keseluruhan mencapai dua miliar dollar AS per tahun atau setara dengan Rp 22 triliun akibat pembalakan liar tersebut [43].

Berdasarkan fenomena tersebut nampak nyata akibat kerakusan dan keserakahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya khususnya terhadap kebutuhan bahan kayu, yang tanpa memperhatikan keberadaan dan kelestarian hutan, dapat menyebabkan kerusakan bahkan kehancuran lingkungan termasuk di dalamnya manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu penyebabnya adalah perilaku korupsi sehingga pembalakan liar semakin merajalela.

Selain pembalakan liar, yang tidak kalah dalam merugikan perekonomian negara yaitu adanya kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini disebabkan oleh berbagai macam hal, diantaranya disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca yang cukup drastis yaitu adanya kemarau panjang dan badai elnino. Yang lebih penting untuk dicermati adalah kebakaran hutan yang disebabkan oleh pembakaran secara sengaja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk membuka lahan perkebunan atau lahan pertanian baru. Ini merupakan perbuatan dalam aktivitas ekonomi yang tidak bisa ditoleransi karena demi kepentingan pribadi atau demi perusahaan, dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara luas. Nampak jelas disini bahwa aktivitas tersebut merupakan keserakahan dalam aktivitas ekonomi yang seharusnya tidak terjadi.

Kerugian yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan pada Juni hingga Oktober 2015 sudah mencapai Rp 221 triliun dengan jumlah hutan yang terbakar di daerah Sumatera dan Kalimantan mencapai 1,7 juta hektar dengan titik api sekitar 1.800. Kerugian akibat kebakaran tersebut melebihi kerugian akibat kebakaran hutan pada tahun 1997 dengan jumlah lahan yang terbakar yang mencapai 9,7 juta hektar. Bahkan untuk menanggulangi kebakaran tersebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mengeluarkan Rp 720 miliar dan menerjunkan sekitar 22 ribu petugas untuk memadamkan kebakaran hutan. Biaya tersebut di luar dari dana yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemendupera) dan Kementerian Kesehatan [44],[45]. Melihat fakta tersebut nampak nyata bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. Tidak sampai disitu, lingkungan sebagai tempat hidupnya makhluk hidup lain juga akan mengalami kerusakan.

Kasus kedua: Penambangan Liar dan Pencemaran Lingkungan

Selain pembakaran hutan dan pembalakan liar, aktivitas ekonomi tidak bisa terlepas dari adanya penambangan liar dan pencemaran lingkungan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memenuhi kebutuhan, menjadi dalil atau alasan bagi oknum tertentu untuk melakukan perbuatan apa saja meskipun perbuatan ekonominya merugikan pihak lain. Inilah fenomena yang terjadi di masyarakat. Berbagai kasus terkait dengan penambangan liar sudah semakin banyak di temukan diberbagai daerah. Salah satu kasus yang cukup

mendapatkan perhatian khalayak dengan banyaknya berita di berbagai media yaitu tentang penambangan pasir yang dilakukan secara liar di Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Bahkan kasus ini telah menelan korban dengan meninggalnya pemerhati atau aktivis lingkungan karena dibunuh oleh beberapa orang termasuk oknum pemerintah desa yang terlibat atau bahkan melindungi penambangan liar yang ada di desa tersebut. Dalam konteks ekonomi, kasus ini sebenarnya membuka mata semua pihak bahwa sebenarnya banyak kasus dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya, dilakukan dengan cara-cara tidak benar, bahkan aktivitas ekonomi yang mengandung keserakahan cenderung di lindungi oleh oknum-oknum tertentu yang berada di lingkungan pemerintahan maupun aparatur lainnya.

Selanjutnya yang perlu juga mendapatkan perhatian adalah terkait dengan pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas industri. Banyak oknum pengusaha yang acuh-tak acuh terhadap keberadaan lingkungan sebagai penyokong keberlanjutan industri bahkan perekonomian secara umum. Mereka banyak membuang limbah berbahaya termasuk membuang ke sungai-sungai, padahal sungai merupakan salah satu sumber bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari. Seharusnya mereka mengelola limbah terlebih dahulu sebelum di buang. Yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah pengusaha tidak mau repot-repot mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengelola limbah. Padahal pencemaran lingkungan dari limbah tersebut menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. contoh di kawasan Rancaekek Bandung Jawa Barat temuan penelitian menunjukkan bahwa total kerugian ekonomi akibat pencemaran mencapai angka Rp. 11.385.847.532.188 (\pm 11,4 triliun). Angka ini terdiri dari perkiraan biaya remediasi yang dibutuhkan untuk pemulihan 933,8 Ha lahan tercemar sebesar Rp.8.045.421.090.700 dan total kerugian masyarakat sejak tahun 2004 hingga 2015 sebesar Rp 3.340.426.441.488. Kerugian multisektor ini meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, kerugian karena kehilangan jasa air, penurunan kualitas udara, dan kehilangan pendapatan [46]. Bahkan di Kota Makassar pencemaran air tanah akibat limbah sudah mencapai 70 persen dan menimbulkan kerugian ekonomi yang mencapai Rp43,3 triliun [47].

Melihat betapa besar dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pencemaran, harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk dalam hal ini dunia pendidikan untuk dapat memberikan penyadaran kepada siswa maupun mahasiswa, agar saat mereka menjalankan usaha tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan baik kepada manusia maupun kepada lingkungan.

Bagian keempat: Semangat Membangun Kembali Melalui Pendidikan Gagalnya Kantin Kejujuran

Salah satu program sangat positif yang perlu mendapatkan apresiasi besar dimunculkan oleh Kejaksaan yang dimulai sekitar tahun 2008 yaitu tentang Kantin Kejujuran. Kantin kejujuran merupakan suatu program dari pemerintah yang salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan pendidikan anti korupsi, dalam arti kata untuk menumbuhkan sikap dan perilaku jujur sejak dini kepada masyarakat sehingga perilaku jujur tersebut dapat mencegah perbuatan korupsi.

Kantin kejujuran banyak didirikan di lingkungan sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA bahkan sampai di tingkat perguruan tinggi. Selain itu kantin tersebut juga sempat merambah ke lingkungan instansi pemerintah dan bahkan ada di instansi swasta. Pendirian kantin tersebut mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak salah satunya yang memberikan dukungan besar adalah pemerintah melalui Kejaksaan dan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan kabupaten/kota) serta anggota DPRD provinsi dan kab/kota. Berbagai macam bentuk dukungan yang diberikan salah satunya adalah pemberian dana yang cukup besar untuk mendirikan kantin tersebut. Bahkan di Bekasi dukungan dalam bentuk pemberian dana untuk mendirikan kantin kejujuran sudah mencapai 600 juta rupiah [48]. Melihat hal tersebut nampaknya semua elemen masyarakat sangat mendukung langkah-langkah ini dalam menyiapkan generasi jujur untuk mencegah korupsi.

Namun fakta menarik di lapangan yang terjadi adalah banyaknya kantin kejujuran yang mengalami kerugian dan bahkan tidak dapat beroperasi lagi alias bangkrut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kantin kejujuran yang telah didirikan antara lain kantin kejujuran di SMPN 1 Pengasih Kulonprogo Yogyakarta yang hanya bisa bertahan selama dua tahun [49]; kantin kejujuran di SMA 8 dan SMA 6 di Kota Bekasi kondisinya memprihatinkan karena barang yang ada di kantin hampir habis akan tetapi uang dari hasil penjualannya tidak sesuai jumlah nominalnya dibandingkan dengan barang yang terjual [50]; kantin kejujuran milik SMA 1 Boyolangu Tulungagung sekitar dua puluh hari selepas di launching sudah mengalami kebangkrutan, tanda-tanda kebangkrutan sudah mulai nampak sejak dua hari dari peresmian kantin pada saat peresmian modal awal sebesar 1,5 juta rupiah yang berwujud makanan dan minuman hanya dapat kembali dengan nilai sebesar 900.000 rupiah, padahal kantin kejujuran di sekolah tersebut direncanakan menjadi pilot projek kantin kejujuran sekolah se-Tulungagung [51].

Berdasarkan fakta tersebut, apakah upaya menanamkan kejujuran dan menanamkan pendidikan antikorupsi sejak dini dapat dikatakan sudah gagal?. Hal tersebut perlu dianalisis lebih lanjut karena kerugian yang dialami oleh kantin tersebut bisa saja disebabkan dari berbagai faktor, memang faktanya salah satunya

akibat ulah tidak jujur dari para pelaku ekonomi yang ada dalam kantin tersebut, dalam hal ini pelaku ekonomi bisa konsumen maupun pihak pengelola kantin. Ketidakjujuran konsumen sangat besar potensinya terjadi untuk membuat kantin kejujuran bangkrut. Kemungkinan tersebut bisa saja terjadi, karena berdasarkan fakta banyak pelajar atau siswa yang membeli barang di kantin tidak membayar sesuai dengan barang yang diambil. Disisi yang lain pengelola kantin juga mempunyai potensi untuk membuat kerugian karena pengelolaan dari kantin tersebut yang tidak memenuhi standar manajemen yang baik, dan juga dimungkinkan perilaku tidak jujur dalam pengelolaan kantin. Apabila kerugian disebabkan karena ketidakjujuran dari para pelaku ekonomi di katin tersebut, maka hal ini sungguh memprihatinkan.

Nah, sekarang timbul pertanyaan kembali, efektifkah kantin kejujuran ini untuk memotong mata rantai ketidakjujuran dalam bentuk korupsi yang selama ini merajalela di negara kita?. Hal ini perlu dibuktikan kurang lebih 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Mengapa demikian? karena kantin kejujuran yang mulai digulirkan sejak sekitar tahun 2008 hampir semuanya gagal, jikalau toh ada yang masih beroperasi tidak akan lama bertahan, bahkan di tahun 2016 ini tidak terdengar sama sekali gaung tentang kantin kejujuran yang berhasil. Kalau dihitung secara sederhana, jika kantin didirikan di suatu sekolah dasar (SD) yang mengalami kegagalan, dan pelaku ekonomi (dalam hal ini konsumen siswa SD) berumur antara 6 sampai 12 tahun, maka untuk mencapai tahap dewasa yang matang dan siap untuk terjun di kehidupan masyarakat (dalam hal ini mempunyai peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan) diperkirakan mulai berumur 30 tahun.

Melihat fenomena kegagalan kantin kejujuran tersebut harus menjadi perhatian ekstra dari berbagai pihak, karena bagaimanapun fakta menunjukkan keserakahan sejak dini masih muncul, sehingga hal ini dapat mendorong perilaku korupsi, dan nampaknya memutuskan mata rantai perilaku korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dilakukan oleh semua pihak.

Meluruskan Prinsip Ekonomi

Berbagai fenomena atau fakta seperti yang telah diungkapkan tersebut di atas, dapat dilihat betapa kecurangan, keserakahan, dan kerakusan yang selalu membayangi dalam kehidupan terutama dalam kehidupan ekonomi. Perbuatan buruk tersebut nampaknya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi yang menggunakan atau menerapkan prinsip ekonomi yang sampai saat ini masih melekat dibenak kita semua yaitu prinsip ekonomi *“Dengan biaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan yang sebesar-besarnya”*. Prinsip ekonomi inilah sampai saat ini masih banyak ditemukan di berbagai buku teks yang digunakan oleh siswa di sekolah maupun oleh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Sehingga prinsip ini sudah mendarahdaging yang seakan-akan sulit untuk dirubah.

Prinsip ekonomi tersebut diajarkan oleh guru maupun oleh dosen secara turun temurun di berbagai tingkatan kelas. Sehingga prinsip ini menjadi semakin lekat dalam benak dan pola pikir siswa atau mahasiswa, yang akan dibawa sampai mereka terjun di kehidupan masyarakat dan menjadi pendidik maka akan mengajarkan prinsip tersebut kepada siswa atau mahasiswanya. Demikian pula bila mereka sudah menjadi pengusaha maka yang terjadi adalah mereka menggunakan berbagai cara termasuk berbuat curang demi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Menjadi lumrah jika pelaku ekonomi yang telah mempelajari atau hanya sekedar mendengar prinsip tersebut menerapkan atau menggunakan prinsip tersebut dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Sekarang timbul pertanyaan, ada apa dengan prinsip tersebut? Apanya yang salah?. Untuk menjawab tersebut, coba perhatikan! *“Dengan biaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan yang sebesar-besarnya”*. Dapat dimaknai bahwa prinsip tersebut mengandung unsur keserakahan dan kerakusan. Selain itu mempunyai maksud untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan yang besar, maka caranya adalah dengan menekan biaya menjadi sekecil-kecilnya dengan melalui berbagai cara termasuk berbuat tidak benar dan curang. Maka dalam konteks ini untuk bisa menekan biaya menjadi sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya maka memungkinkan bagi pelaku ekonomi melakukan manipulasi atau melakukan siasat dengan cara pertama, berbuat curang atau memanipulasi dengan cara tidak baik, bisa dengan menggunakan bahan berbahaya atau menggunakan bahan yang sudah tidak layak yang disulap menjadi bahan yang seakan-akan layak untuk digunakan sebagai bahan untuk produksi; kedua, dengan cara tidak memberikan hak-hak yang semestinya diberikan kepada pihak lain maupun kepada karyawan, perlu diingat bahwa biaya tenaga kerja menjadi salah satu bagian dari biaya produksi, dengan menekan biaya produksi dari tenaga kerja, dimaksudkan untuk memperoleh selisih yang lebih tinggi sehingga hasil atau keuntungan menjadi semakin besar.

Maka dapat dikatakan bahwa prinsip ekonomi yang tepat adalah **memaksimalkan potensi yang ada, memaksimalkan sumber daya yang ada, efisiensi sumber daya, memaksimalkan hasil sesuai dengan biaya atau sumber daya yang tersedia**. Inilah prinsip ekonomi yang sebenarnya. Untuk mendukung argumentasi prinsip ekonomi tersebut, secara sederhana diberikan contoh sebagai berikut: seorang pengusaha mempunyai sumber daya bernilai sebesar 1 juta yang dapat menghasilkan maksimal 10 output dan sudah tidak ada hasil yang lebih tinggi. Maka dia menerapkan prinsip tersebut bila dengan sumber daya 1 juta mampu

memproduksi dan menghasilkan 10 output, berarti dia memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada tanpa mengurangi atau menggunakan bahan berbahaya atau tanpa mengurangi hak-hak karyawan, atau bisa dikatakan pengusaha menggunakan prinsip efisiensi. Akan tetapi bila pengusaha dengan biaya tersebut hanya menghasilkan kurang dari 10 (9, 8, 7, dan seterusnya), maka hal tersebut tidak efisien, tidak memaksimalkan sumber daya yang ada, berarti tidak menggunakan prinsip tersebut dengan benar, akibatnya kerugian yang pasti akan diterima.

Selanjutnya bila pengusaha dengan biaya tersebut menghasilkan lebih dari 10 (11, 12, 13, dan seterusnya) maka pengusaha tersebut kemungkinan besar berbuat curang atau melakukan hal-hal yang tidak benar. Mengapa demikian? Karena sebenarnya dengan biaya 1 juta seharusnya maksimal menghasilkan 10, tetapi pengusaha tersebut menghasilkan lebih dari 10, yang terjadi adalah mereka cenderung memanipulasi untuk menghasilkan keuntungan atau hasil yang besar dengan cara-cara yang tidak benar atau dengan cara curang. Hal inilah yang sering terjadi pada kasus di bagian kedua seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas.

Apa makna dari prinsip ekonomi dengan argumentasi contoh tersebut? Pertama, dalam aktivitas ekonomi pengusaha harus mampu memaksimalkan sumber daya yang ada, harus mampu memaksimalkan hasil dengan biaya yang tersedia. Hal inilah sering dijumpai banyak pengusaha yang tidak mampu memaksimalkan potensi serta sumber daya yang ada pada dirinya, sehingga usaha yang dijalankan tidak berhasil dengan baik. Akibatnya usaha kalah bersaing dengan usaha lain yang sejenis, sehingga pengusaha cenderung menyalahkan pihak lain. Kedua, untuk mendapatkan hasil yang maksimal harus meninggalkan cara-cara jahat dan curang. Penggunaan cara-cara jahat dan curang dapat mengakibatkan pada menurunnya kepercayaan konsumen terhadap usaha, dalam arti kata kecurangan dan cara jahat akan menurunkan citra usaha di mata konsumen, dengan menurunnya kepercayaan dari konsumen maka dapat dipastikan lambat atau cepat usaha akan mengalami keruntuhan, dan sebaliknya penggunaan cara-cara yang benar akan menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan dari konsumen atau meningkatkan citra usaha yang dibangun.

Berdasarkan paparan tersebut, sudah selayaknya prinsip ekonomi yang selama ini dipelajari oleh siswa dan mahasiswa serta digunakan oleh pengusaha harus dirubah dengan prinsip ekonomi yang telah disebutkan di atas. Disinilah peran pendidikan khususnya pendidikan ekonomi mengajarkan prinsip ekonomi yang tepat dan meluruskan kembali prinsip ekonomi yang selama ini digunakan.

Mengembangkan Nilai-Nilai Karakter Melalui Pembelajaran Ekonomi

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan bangsa selalu beriringan dengan kemajuan pendidikan. Oleh karena itu menjadi sangat penting bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun selama ini nampaknya pendidikan belum mampu menciptakan insan atau manusia yang baik dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Banyak pelaku ekonomi yang merusak tatanan ekonomi dengan perilakunya yang serakah dan rakus. Perilaku serakah dan rakus dari para pelaku ekonomi adalah orang-orang yang mempunyai pendidikan yang terbilang cukup tinggi dan mempunyai kemampuan secara ekonomi.

Sekarang muncul pertanyaan, apa yang kurang dari kontribusi pendidikan bagi mereka? sehingga dalam perilaku ekonomi mereka muncul kecurangan, keserakahan yang akhirnya cenderung merugikan. Pertanyaan tersebut dapat dijawab bahwa selama ini pendidikan masih belum maksimal dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini pengetahuan agama dan moral yang diberikan di sekolah dalam proses pembelajaran belum maksimal terhadap perubahan perilaku [52].

Dalam konteks inilah diperlukan pendidikan karakter, terutama dalam pendidikan ekonomi. Karakter merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan, yang diwujudkan ke dalam pikiran, sikap, dan perbuatan [53]. Hal yang sama bahwa pendidikan karakter merupakan upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk dengan interaksi dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, dan dengan lingkungannya [54]. Nilai-nilai pendidikan karakter yang selama ini sudah di tanamkan kepada peserta didik menurut kementerian pendidikan nasional yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab [55].

Menelisik hal tersebut di atas dapat diungkapkan bahwa pendidikan karakter dalam ekonomi dapat dirumuskan sebagai watak atau akhlak dalam diri pelaku ekonomi yang terbangun dan diwujudkan dalam aktivitas ekonomi yang berorientasi pada kemajuan dan tidak merugikan yang lain. Nampaknya beberapa nilai-nilai pendidikan karakter tersebut cocok diterapkan dalam konteks pembelajaran ekonomi. Dapat disarikan bahwa pendidikan karakter yang harus ditanamkan dan dikembangkan dalam konteks ekonomi adalah terkait dengan nilai karakter adalah (1) bertanggung jawab, (2) kejujuran, dan (3) kepedulian. Inilah tiga hal yang harus

secara konsisten ditanamkan ke dalam pola pikir dan diwujudkan dalam bentuk tindakan oleh siswa atau mahasiswa dalam menjalankan aktivitas ekonomi saat ini dan kelak pada saat sudah terjun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pertama, bertanggung jawab dalam hal ini adalah bagaimana pelaku ekonomi bertanggung jawab terhadap kehidupan ekonomi diri sendiri, karyawan, masyarakat di sekitarnya, dan secara luas terhadap perekonomian negara. Bertanggung jawab terhadap kehidupan ekonomi diri sendiri dalam sudut sebagai produsen adalah bagaimana pelaku ekonomi mampu mempertahankan kelanjutan usahanya dengan memanfaatkan dan memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada dalam dirinya agar usaha yang dijalankan mampu bertahan, jika tidak maka keruntuhan ekonomi pribadi akan terwujud. Dalam konteks ini pelaku ekonomi yang bertanggung jawab terhadap dirinya akan memberikan kemanfaatan bagi kehidupan ekonomi masyarakat disekitarnya dan perekonomian negara. Contoh nyata adalah usaha yang berjalan dengan baik akan mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat di sekitarnya. Masyarakat yang bekerja dan mempunyai pendapatan pada akhirnya akan memberikan efek pada pendapatan negara melalui pajak maupun hal lainnya. Selain itu produsen juga harus bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Contoh dalam hal ini adalah kerusakan lingkungan. Disamping itu dari sudut sebagai konsumen juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan ekonominya. Tidak bisa konsumen selalu menyalahkan produsen terkait dengan produk yang mereka konsumsi. Konsumen dalam hal ini juga harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi suatu barang. Sehingga antara produsen dan konsumen sama-sama bertanggung jawab terhadap tindakan ekonominya.

Kedua, kejujuran merupakan suatu yang dapat dipercaya, sesuatu yang berasal dari pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dapat dibenarkan. Dalam hal ini aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi harus mengedepankan kejujuran, tanpa kejujuran dapat dipastikan aktivitas ekonomi yang dijalankan akan mengalami keruntuhan cepat atau lambat pasti akan terjadi. Mengapa demikian? Karena kejujuran dapat memberikan dan menumbuhkan kepercayaan kepada konsumen tentang produk yang dihasilkan. Dengan demikian citra diri diwujudkan dan dibangun melalui kejujuran yang akan menumbuhkan kepercayaan dan pada akhirnya membawa pada kemajuan usaha. Contoh kasus yang patut diperhatikan adalah pada perusahaan otomotif multinasional. Banyak perusahaan otomotif dunia yang berani menarik produk yang telah beredar di pasaran. Seperti pada perusahaan Toyota yang akan menarik 6,5 juta kendaraan buatannya diseluruh dunia akibat masalah tombol jendela yang dapat menyebabkan risiko kebakaran [56], hal yang sama juga dilakukan oleh Honda Motor yang menarik dua juta unit mobil di seluruh dunia. Penarikan ini dilakukan karena adanya kesalahan dalam kantung udara yang berpotensi menimbulkan api [57]. Inilah contoh kejujuran yang akan membawa citra baik bagi perusahaan dan menanamkan kepercayaan kepada konsumen tentang produk yang dihasilkan. Sedangkan contoh kasus yang negatif salah satunya seperti yang telah dijelaskan pada bagian penggunaan bahan berbahaya tersebut di atas.

Ketiga, kepedulian harus dibangun oleh pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas usahanya. Kepedulian merupakan sikap dan tindakan yang berorientasi pada perhatian, baik perhatian kepada sesama maupun kepada lingkungan. Dalam konteks ekonomi, kepedulian harus selalu tertanam pada setiap pelaku usaha, tanpa hal tersebut akan timbul aktivitas yang merugikan. Banyak contoh yang dapat diungkapkan diantaranya seperti yang dijelaskan pada bagian tentang krisis ekonomi, pemalsuan, penganiayaan dalam aktivitas usaha, pembakaran hutan dan pembalakan liar, serta penambangan liar dan pencemaran lingkungan. Kepedulian inilah yang sering kali terabaikan dalam aktivitas ekonomi. Pelaku ekonomi yang peduli akan sangat membantu bagi keberlanjutan perekonomian nasional.

Namun selama ini dalam proses pembelajaran ekonomi belum secara konsisten menanamkan nilai-nilai karakter tersebut. Dalam proses pembelajaran ekonomi pendidik hanya sebatas menyampaikan kedalaman materi tanpa mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai kebaikan dalam aktivitas ekonomi. Termasuk pendidik selama ini hanya menanamkan prinsip ekonomi yang kurang tepat seperti yang telah dijelaskan. Oleh karena itu dalam pendidikan ekonomi mau tidak mau harus mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam konteks ekonomi tersebut. Dalam arti pendidikan karakter dalam pendidikan ekonomi harus dimunculkan. Memang selama ini masih menjadi perdebatan terkait dengan pengembangan pendidikan karakter yang harus diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran atau mata kuliah pada saat proses pembelajaran ataukah pendidikan karakter tersebut dibuat matakuliah atau mata pelajaran tersendiri.

Terlepas dari hal tersebut, nampaknya urgensi penanaman dan pengembangan pendidikan karakter di pendidikan ekonomi harus segera diwujudkan. Pengembangan dan penanaman pendidikan karakter dapat diberikan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dibutuhkan kejelian dari pendidik dalam mengelola atau mengorganisasi kelas dengan menggunakan berbagai model pembelajaran. Pendidik harus mampu menyampaikan nilai-nilai karakter dengan cara memberikan contoh riil dari aktivitas usaha yang dijalankan oleh pelaku ekonomi, baik yang dijalankan dengan cara-cara tidak benar atau negatif dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut maupun perilaku ekonomi yang menerapkan cara-cara benar atau

cara-cara positif. Hal ini akan membuka pola pikir dan akan tertanam kuat dalam diri siswa atau mahasiswa, sehingga aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak menyimpang dan tidak merugikan. Selama ini hal tersebut luput dari aktivitas pembelajaran ekonomi. Disinilah peran pendidikan ekonomi untuk menyebarluaskan konsep pendidikan karakter yang berorientasi ekonomi yang meliputi tanggung jawab ekonomi, kejujuran ekonomi, dan kepedulian ekonomi. Dengan nilai karakter tersebut, kerakusan, keserakahan, kecurangan, penipuan dan hal-hal yang tidak baik dalam aktivitas ekonomi akan semakin dapat diminimalisir, sehingga aktivitas ekonomi yang dijalankan dapat membawa kemanfaatan bagi seluruh masyarakat dan membawa kemajuan bagi perekonomian nasional.

Penutup

Aktivitas ekonomi merupakan aktivitas yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia dalam aktivitas ekonomi pasti dihadapkan dengan bagaimana memenuhi berbagai macam kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas. Dengan keterbatasan tersebut manusia berusaha dengan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin kompleksnya kebutuhan manusia, mendorong untuk memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi kadangkalanya cara-cara yang digunakan bertentangan, menyimpang, dan merugikan. Keserakahan dan kerakusan yang melekat pada makhluk ekonomi selalu membayang-bayangi aktivitas ekonomi yang dijalankan.

Sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya, manusia juga dihadapkan pada keharusan untuk tidak merugikan orang lain. Dalam konteks inilah peran pendidikan ekonomi begitu sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang berorientasi ekonomi yang meliputi tanggung jawab ekonomi, kejujuran ekonomi, dan kepedulian ekonomi. Pendidikan ekonomi harus mampu menanamkan nilai tersebut dalam proses pembelajaran. Nilai tersebut membentuk pola pikir dan tertanam kuat dalam perilaku siswa atau mahasiswa sehingga menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan ekonomi baik saat ini maupun kelak di kehidupan masyarakat, agar tidak menyimpang dan tidak merugikan.

Daftar Pustaka

- [1]. Wang, L., & Murnighan, J. K. (2011). On greed. *The Academy of Management Annals*, 5(1), 279-316.
- [2]. Smit, A. 2013. Responsible leadership development through management education: A business ethics perspective. *African Journal of Business Ethics*, 7(2). 45-51.
- [3]. Hausman, D. M., & McPherson, M. S. 1993. Taking ethics seriously: Economics and contemporary moral philosophy. *Journal of Economic Literature*, 31(2), 671-731.
- [4]. Ghoshal, S. 2005. Bad management theories are destroying good management practices. *Academy of Management Learning and Education*, 4(1), 75-91.
- [5]. Althof, W., & Berkowitz, M.W. (2006). Moral education and character education: Their relationship and roles in citizenship education. *Journal of Moral Education*, 35(4), 495-518.
- [6]. Jaringnews.com. 2011. Begini Cerita Depresi Global Tahun 1930-an. (online) <http://jaringnews.com/ekonomi/umum/6984/begini-cerita-depresi-global-tahun-an>. diakses 16 Agustus 2016. Diakses 12 Agustus 2016.
- [7]. Id.wikipedia.org. 2016. Runtuhnya Wall Street 1929. (online) https://id.wikipedia.org/wiki/Runtuhnya_Wall_Street_1929. diakses 16 Agustus 2016.
- [8]. Skousen, M. 2001. *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern: Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Alih bahasa oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Prenada Media Group.
- [9]. Jaringnews.com. 2011. Begini Cerita Depresi Global Tahun 1930-an. (online) <http://jaringnews.com/ekonomi/umum/6984/begini-cerita-depresi-global-tahun-an>. diakses 16 Agustus 2016. Diakses 12 Agustus 2016.
- [10]. Skousen, M. 2001. *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern: Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Alih bahasa oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Prenada Media Group.
- [11]. Id.wikipedia.org. 2016. Krisis finansial Asia 1997. (online) https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_finsial_Asia_1997. diakses 16 Agustus 2016.
- [12]. Seasite.niu.edu. 1998. Laporan Akhir Tahun Bidang Ekonomi: Krisis Ekonomi 1998, Tragedi tak Terlupakan. (online) http://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/krisis_ekonomi.htm. diakses 16 Agustus 2016.
- [13]. Seasite.niu.edu. 1998. Laporan Akhir Tahun Bidang Ekonomi: Krisis Ekonomi 1998, Tragedi tak Terlupakan. (online) http://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/krisis_ekonomi.htm. diakses 16 Agustus 2016.
- [14]. Whitehead, P. & Crawshaw, P. 2014. A Tale of Two Economies: the Political and the Moral in Neoliberalism. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 34(1/2), 19-34.
- [15]. Economy.okezone.com. 2008. 27 Momentum Paling Menakutkan dari Krisis Ekonomi 2008. <http://economy.okezone.com/read/2015/09/18/213/1216969/27-momentum-paling-menakutkan-dari-krisis-ekonomi-2008> diakses 13 Agustus 2016.
- [16]. Finance, detik.com. 2009, kronologi dan latar belakang krisis finansial global, <http://finance.detik.com/read/2009/04/15/kronologi-dan-latar-belakang-krisis-finsial-global>. diakses pada tanggal 20 Agustus 2016.
- [17]. Nasional.sindonews.com. 2014. Putusan Inkracht, KPK Segera Eksekusi Irjen Djoko Susilo. (online) <http://nasional.sindonews.com/read/880425/13/putusan-inkracht-kpk-segera-eksekusi-irjen-djoko-susilo-1404670664>. diakses 13 Agustus 2016.
- [18]. Politik.news.viva.co.id. 2009. MA Tetap Vonis Urip 20 Tahun Penjara. (online) <http://politik.news.viva.co.id/news/read/39260-ma-tetap-vonis-urip-20-tahun-penjara>. diakses 15 Agustus 2016.
- [19]. Nasional.sindonews.com. 2016. Gatot Divonis 3 Tahun dan Istrinya 2,5 Tahun Penjara. (online) <http://nasional.sindonews.com/read/1092877/13/gatot-divonis-3-tahun-dan-istrinya-2-5-tahun-penjara-1457951216>. diakses 10 Agustus 2016.
- [20]. Bbc.com. 2014. Akil Mochtar divonis hukuman seumur hidup. (online) http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar. diakses 7 Agustus 2016.
- [21]. Nasional.sindonews.com. 2016. Hukuman Ditambah Jadi 7 Tahun, OC Kaligis Ajukan Kasasi. (online) <http://nasional.sindonews.com/read/1114143/13/hukuman-ditambah-jadi-7-tahun-oc-kaligis-ajukan-kasasi-1465094118>. diakses 11 Agustus 2016.
- [22]. Nasional.tempo.co. 2016. Bupati Empat Lawang dan Istrinya Masuk Penjara Bersama. (online) <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/15/063736388/bupati-empat-lawang-dan-istrinya-masuk-penjara-bersama>. diakses 10 Agustus 2016.

- [23]. Merdeka.com.2015. Terbukti korupsi, Ratu Atut resmi dipecat sebagai gubernur Banten. (online) <http://www.merdeka.com/peristiwa/terbukti-korupsi-ratu-atut-resmi-dipecat-sebagai-gubernur-banten.html>. diakses 13 Agustus 2016.
- [24]. Nasional.kompas.com. 2014. Dituntut 10 Tahun, Andi Mallarangeng Divonis 4 Tahun Penjara. (online) <http://nasional.kompas.com/read/2014/07/18/14583141/Dituntut.10.Tahun.Andi.Mallarangeng.Divonis.4.Tahun.Penjara>. diakses 11 Agustus 2016.
- [25]. Nasional.kompas.com. 2016. Divonis untuk Dua Kasus Berbeda, Hukuman Nazaruddin Jadi 13 Tahun Penjara. (online) <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/16/07530431/divonis.untuk.dua.kasus.berbeda.hukuman.nazaruddin.jadi.13.tahun.penjara>. diakses 16 Agustus 2016.
- [26]. Kemenperin.go.id. 2015. Kerugian Akibat Peredaran Barang Palsu Capai Rp 65 T . (online) <http://kemenperin.go.id/artikel/9703/Kerugian-Akibat-Peredaran-Barang-Palsu-Capai-Rp-65-T>. 10 Agustus 2016.
- [27]. Forumkeadilan.com. 2015. Barang Palsu Rugikan Negara Rp65,1 Triliun Per Tahun. (online) <http://forumkeadilan.com/ekonomi/barang-palsu-rugikan-negara-rp651-triliun-per-tahun/>. Diakses 10 Agustus 2016.
- [28]. M.tempo.co. 2016. Begini Awal Terungkapnya Keberadaan Vaksin Palsu. (online) <http://m.tempo.co/read/news/2016/06/29/060784080/begini-awal-terungkapnya-keberadaan-vaksin-palsu>. diakses 14 Agustus 2016.
- [29]. News.detik.com. 2016. Kicauan Mengejutkan Pasutri Pembuat Vaksin Palsu. (online) <http://news.detik.com/berita/3243774/kicauan-mengejutkan-pasutri-pembuat-vaksin-palsu>. diakses 8 Agustus 2016.
- [30]. Nasional.republika.co.id. 2016. Kartu BPJS Kesehatan Palsu Dibuat Komplotan. (online) <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/07/26/oawyyr382-kartu-bpjs-kesehatan-palsu-dibuat-komplotan>. diakses 12 Agustus 2016.
- [31]. Nasional.republika.co.id. 2016. Kartu BPJS Palsu Sudah Satu Tahun Beredar. (online) <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/07/26/oavsx1359-kartu-bpjs-palsu-sudah-satu-tahun-beredar>. diakses 13 Agustus 2016.
- [32]. Stewart, Aileen Mitchel. 1998. *Empowering People: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Kanisius.
- [33]. M.tempo.co. 2013. Ini Motif Perbudakan Buruh Panci di Tangerang. (online) <https://m.tempo.co/read/news/2013/05/05/064478014/ini-motif-perbudakan-buruh-panci-di-tangerang>. diakses 15 Agustus 2016.
- [34]. Voaindonesia.com. 2013. Korban Perbudakan di Pabrik Panci Tangerang Alami Trauma . (online) <http://www.voaindonesia.com/a/korban-perbudakan-di-pabrik-panci-tangerang-alami-trauma/1657509.html>. diakses 9 Agustus 2016.
- [35]. News.okezone.com. 2014. PRT Medan Tewas Disiksa dan Direndam di Bak Mandi. (online) <http://news.okezone.com/read/2014/11/28/340/1072046/prt-medan-tewas-disiksa-dan-direndam-di-bak-mandi>. diakses 13 Agustus 2016.
- [36]. Metro.sindonews.com. 2015. Petugas Temukan Makanan Berformalin di Kantin Sekolah. (online) <http://metro.sindonews.com/read/1030561/170/petugas-temukan-makanan-berformalin-di-kantin-sekolah-1438939862>. diakses 8 Agustus 2016.
- [37]. Metro.sindonews.com. 2015. Polisi Bongkar Pabrik Tahu Berformalin di Cipayung. (online) <http://metro.sindonews.com/read/1022510/170/polisi-bongkar-pabrik-tahu-berformalin-di-cipayung-1436538971>. diakses 15 Agustus 2016.
- [38]. Beritatrans9.com. 2015. Waspada, kulit dan Kikil Sapi Busuk dan Berbelatung. (online) <http://www.beritatrans9.com/?p=6018>. Diakses 9 Agustus 2016.
- [39]. News.liputan6.com. 2015. Waspada, Kikil Sapi Busuk dan Berbelatung di Bandung. (online) <http://news.liputan6.com/read/2168518/waspada-kikil-sapi-busuk-dan-berbelatung-di-bandung>. diakses 10 Agustus 2016.
- [40]. kabar24.bisnis.com. 2016. Makanan Kadaluarsa Masih Banyak Dijual. (online) <http://kabar24.bisnis.com/read/20160417/78/538638/makanan-kadaluarsa-masih-b>. diakses 15 Agustus 2016.
- [41]. Bertens, K. 2013. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta. Kanisius.
- [42]. Antarariau.com. 2013. Kerugian Akibat Pembalakan Liar Terus Meningkat. (online) <http://www.antarariau.com/berita/31716/kerugian-akibat-pembalakan-liar-terus-meningkat>. diakses 9 Agustus 2016.

- [43]. Jpnn.com. 2013. Indonesia Merugi Rp 22 Triliun Akibat Pembalakan Liar. (online) <http://www.jpnn.com/read/2013/11/07/199641/Indonesia-Merugi-Rp22-Triliun-Akibat-Pembalakan-Liar-> diakses 13 Agustus 2016.
- [44]. Bbc.com. 2015. Dampak kabut asap diperkirakan capai Rp 200 triliun. (online) http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap. diakses 7 Agustus 2016.
- [45]. Republika.co.id. 2015. BNPB Catat Kerugian Akibat Kebakaran Hutan 2015 Rp 221 Triliun. (online) <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/20/nzms82359-bnpb-catat-kerugian-akibat-kebakaran-hutan-2015-rp-221-triliun>. diakses 12 Agustus 2016.
- [46]. Greenpeace.org. 2016. Konsekuensi Tersembunyi: Valuasi Kerugian Ekonomi Akibat Pencemaran Industri. (online) <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/valuasi-kerugian-ekonomi-akibat-pencemaran-limbah-industri/>. Diakses 8 Agustus 2016.
- [47]. Makassar.antarane.ws.com. 2011. Kerugian Ekonomi Akibat Pencemaran Mencapai Rp43,3 Triliun. (online) <http://makassar.antarane.ws.com/berita/28680/kerugian-ekonomi-akibat-pencemaran-mencapai-rp433-triliun>. diakses 12 Agustus 2016.
- [48]. Republika.co.id. 2009. Kantin Kejujuran di Bekasi Banyak Yang Bangkrut. (online) <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/90966>. diakses 11 Agustus 2016.
- [49]. Harianjogja.com. 2011. Kantin kejujuran di sekolah mati karena perilaku tidak jujur. (online) <http://www.harianjogja.com/baca/2011/12/19/kantin-kejujuran-di-sekolah-mati-karena-perilaku-tidak-jujur-151940>. diakses 11 Agustus 2016.
- [50]. Republika.co.id. 2009. Kantin Kejujuran di Bekasi Banyak Yang Bangkrut. (online) <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/90966>. diakses 11 Agustus 2016.
- [51]. News.okezone.com. 2008. Kantin Kejujuran Tulungagung Bangkrut. (online) <http://news.okezone.com/read/2008/12/29/1/177767/kantin-kejujuran-tulungagung-bangkrut>. diakses 9 Agustus 2016.
- [52]. Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [53]. Muslich, M. 2011. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [54]. Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [55]. Disdik.riau.go.id. 2014. 18 Nilai dalam Pendidikan Karakter. (online) <http://disdik.riau.go.id/berita-18-nilai-dalam-pendidikan-karakter-bangsa.html>. diakses 8 Agustus 2016.
- [56]. Pikiran-rakyat.com. 2015. Toyota Menarik 6,5 Juta Kendaraan dari Seluruh Dunia. (online) <http://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/2015/10/22/346935/toyota-menarik-65-juta-kendaraan-dari-seluruh-dunia>. diakses 16 Agustus 2016.
- [57]. Suara.com. 2014. Kantong Udara Cacat, Honda Motor Tarik 2 Juta Unit Mobil. (online) <http://www.suara.com/otomotif/2014/06/23/135736/kantong-udara-cacat-honda-motor-tarik-2-juta-unit-mobil>. diakses 16 Agustus 2016.